

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



WEDONA VERONITA CHERLIN

NPM : 167110490

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Wedona Veronita Cherlin
NPM : 167110490
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi masing-masing bab-bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam bidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 24 Agustus 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing

Ketua



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si



Nurmasari, Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wedona Veronita Cherlin
NPM : 167110490
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

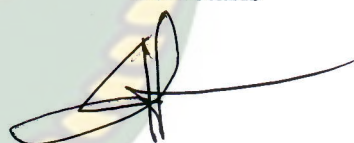
Pekanbaru, 24 Agustus 2021

Ketua



Nurmasari, Sos., M.Si

Sekretaris



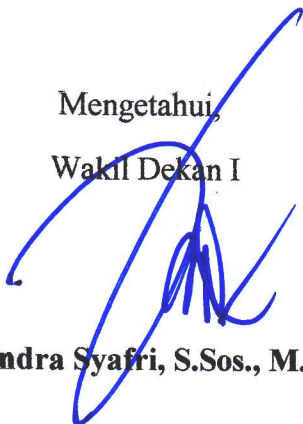
Andri Kurniawan, B.PM., M.Si
Anggota,



Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

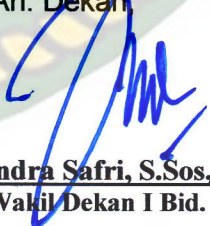
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1214/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 18 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Agustus 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Wedona Verinica Cherlin
NPM : 167110490
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si	Anggota	3. 
4.	Loliita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	4. 

Pekanbaru, 19 Agustus 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 1159/UIR-Fs/Kpts/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen Pembimbing;
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: Nurmasari, S.Sos., M.Si
NIP/NPK	: 160102528
Pangkat/ Jabatan	: III/d-Lektor
Kedudukan	: Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama	: Wedona Veronita C. Herlin
NPM	: 167110490
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal 29 Juli 2021 s/d 29 Desember 2021, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan..

- Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juli 2021
Dekan,

Dr. Syarif Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi AP
3. Yth. Ka. Labor AP
4. Arsip SK Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wedona Veronita Cherlin
NPM : 167110490
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 24 Agustus 2021

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Nurmasari, Sos., M.Si



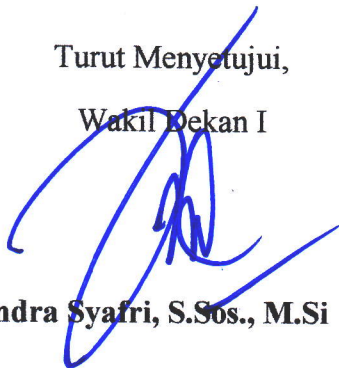
Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Turut Menyetujui,

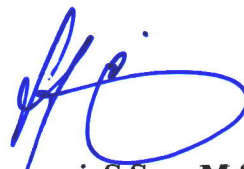
Program Studi Administrasi Publik

Wakil Dekan I

Ketua



Indra Syafri, S.Sos., M.Si



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah Nya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru”**.

Kemudian Shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli’ala saidina Muhammad Wa’ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu’alaika Ya Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Univesitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL yang telah menyediakan fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman dan selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Ibu Nurmasari, Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Administrasi Publik.
6. Seluruh Staff, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Rekan – Rekan yang telah mengizinkan dan memberikan informasi kepada peneliti dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
8. Teristimewa dengan ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda Chery dan Ibunda tercinta Delina, dan untuk ke dua saudara saya Kakak Lucia Anita Cherlin, dan Adik Dadan Fernando Cherlin yang selalu memberikan do'a dan dorongan secara moril dan materi

kepada penulis, dan selalu memberikan motivasi dan semangat yang sangat luar biasa.

9. Kepada Kekasih tercinta Tommy Susanto yang selalu menemani serta memberikan semangat dan motivasinya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terkasih yang selalu memberikan doa, semangat serta menemani penulis sampai saat ini : Princilia Juliani, Devi Oktavia, Melda Nopita, Rizky Oktavia, Sity Khumaiyah, Winda Evrilia Putri.
11. Teman – teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik 2016 kelas C yang telah menemani semasa kuliah dan berbagi semangat dalam berjuang mencari ilmu, terimakasih untuk kebersamaannya.

Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dapat menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Agustus 2021

Penulis,

Wedona Veronita Cherlin

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
SK TIM PENGUJI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Kegunaan Penelitian	21
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	22
A. Studi Kepustakaan	22
1. Konsep Administrasi.....	22
2. Konsep Organisasi	25
3. Konsep Manajemen	28
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	32
5. Konsep Pembinaan.....	33
6. Konsep Anak Jalanan.....	38
7. Konsep Kemiskinan	40
B. Kerangka Pikir	41
C. Konsep Operasional	43

D. Operasional Variabel	46
E. Teknik Pengukuran	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Objek Penelitian	51
C. Populasi dan Sampel	52
D. Teknik Penarikan Sampel	53
E. Jenis dan Sumber Data	54
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data	57
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	58
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	59
B. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	67
C. Sejarah Pembentukan Satuan Pamong Praja	77
D. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	81
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Identitas Responden	85
1. Jenis Kelamin	86
2. Usia Responden	86
B. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan Kota Pekanbaru	87
1. Pembinaan Individu	88
2. Pembinaan Kelompok	93
C. Rekapitulasi Variabel Responden Tentang Analisis Pembinaan anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru	98
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Faktor Penghambat Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru	101
C. Saran	103
DAFTAR KEPUSTAKAAN	104
DOKUMENTASI	107
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2019	9
I.2 : Jumlah Anak Jalanan Yang Terjaring di Pekanbaru Tahun 2017-2019	13
I.3 : Jumlah Anak Jalanan Yang Dibina Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019	14
I.4 : Pelaksanaan kegiatan TIM reaksi Cepat (TRC) tahun 2020	16
I.5 : Kegiatan Pembinaan bagi anak jalanan Kota Pekanbaru	17
II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru	46
II.2 : Pengukuran Skala Likert	47
III.1 : Tabel Populasi Dan Sampel Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru	53
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru. ...	58
IV.1 : Jumlah Penduduk dan jenis Kelamin berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru	64
IV.2 : Jumlah penduduk menurut umur berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru	65
V.1 : Distribusi Jumlah Responden Anak Jalanan Menurut Jenis Kelamin Pada Pembinaan Anak Jalanan Kota Pekanbaru	86

V.2	: Distribusi Jumlah Responden Pembinaan Anak Jalanan Berdasarkan Usia.....	87
V.3	: Distribusi Tanggapan Responden Pembinaan Anak Jalanan Mengenai Indikator Pembinaan Individu Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru	89
V.4	: Distribusi Tanggapan Responden Pembinaan Anak Jalanan Mengenai Indikator Pembinaan Kelompok Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru	94
V.5	: Rekapitulasi Tanggapan responden tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	98

DAFTAR GAMBAR

II.1	: Kerangka Pikir tentang Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial	
	Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru.....	42
IV.1	: Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	75
IV.2	: Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisioner untuk Anak Jalanan yang dibina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	115
2. Daftar Wawancara untuk Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	119
3. Daftar Wawancara Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak	123
4. Rekap Telly data Penelitian tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	127
5. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Penulisan Skripsi	128
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.....	129
7. Surat Rekomendasi Riset dari Fakultas	130
8. Surat Rekomendasi Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	131
9. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	132
10. Surat Balasan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru	133

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wedona Veronita Cherlin
NPM : 167110490
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Agustus 2021



Wedona Veronita Cherlin

ANALISIS PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

WEDONA VERONITA CHERLIN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pembinaan Anak Jalanan, penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif karena peneliti ingin menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan pada saat tertentu serta ingin mendapatkan data yang akurat. Dengan cara penarikan sampel menggunakan tektik *Purposive Sampling* dimana teknik mengambil sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari sampel yang ditetapkan. Peneliti menggunakan indikator dari .Asmaya (2013:11) tentang Pembinaan yaitu Pembinaan Individu dan Pembinaan Kelompok. Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar besarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya untuk keseluruhan indikator pada pembinaan anak jalanan berada pada skor 196 dalam skala 151-210 dikategorikan pada “Cukup Terlaksana”.

Kata Kunci : Pembinaan, Anak Jalanan, Dinas Sosial

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF STREET CHILDREN BY THE SOCIAL SERVICE OF THE CITY OF PEKANBARU

ABSTRACT

WEDONA VERONITA CHERLIN

This study aims to determine the analysis off street children's development, this study uses a descriptive survey type using quantitative methods because researchers want to describe phenomena that accur in the field at certain times and want to get accurate data. By means of sampling using purposive sampling technique where the technique of taking samples is done based on certain objectives, as long as it does not deviate from the specified sample. The researcher uses indicators from Asmaya (2013;11) about coaching, namely individual coaching and grub coaching. Coaching is a process of using humans, equipment, money, time, methods and system based on certain principles to achieve predetermined goals with asmuch data and results as possible.the results of thestudy indicate that for all indicators on the development of street children, a score of 196 on a scale of 151-210 is categorized as "Enouh Executed".

Keywords : Construction, Street Children, Social Service

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi sesungguhnya sama tuannya dengan peradapan manusia. Artinya, kegiatan administrasi sudah ada sejak adanya kerjasama manusia antar manusia itu terjadi. Menurut Siagian (dalam Wirman Syafri (2012:9) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang

Silalahi (dalam Zulkifli, 2005:20) administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya – sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduk sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ditegaskan pula dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1)

menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anak terlantar, dan anak jalanan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara Indonesia mengatur perlindungan anak yang menyatakan bahwa “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selanjutnya mengenai “perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kekerasan, baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran” (Mulia Astuti, 2013:16).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa jenis, definisi dan kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS sebagai berikut :

1. Anak balita terlantar.
2. Anak terlantar.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Anak jalanan.
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK).
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
8. Lanjut usia terlantar.
9. Penyandang disabilitas.
10. Tuna susila.
11. Gelandangan.
12. Pengemis.
13. Pemulung.
14. Kelompok Minoritas.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Permusyawaratan (BWBLP).
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA.
18. Korban Trafficking.
19. Korban tindak kekerasan.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
21. Korban bencana alam.
22. Korban bencana sosial.
23. Perempuan rawan sosial ekonomi.
24. Fakir miskin.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis.
26. Komunitas Adat terpencil.

Adapun perbedaan Anak Jalanan dan Anak Terlantar sebagai berikut :

Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja dijalanan, anak yang bekerja dan hidup dijalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan

kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria anak jalanan adalah : menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan maupun di tempat-tempat umum, mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.

Sedangkan Anak Terlantar adalah seorang anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua / keluarga. Kriteria anak terlantar adalah : berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Adapun disini peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian tentang “Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru”

Secara garis besar Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum mereka banyak yang terpaksa harus bekerja, padahal sesuai usia mereka seharusnya berada di sekolah. Namun, walaupun mereka bekerja dengan benar tanpa harus terjun kedalam dunia kriminal, dengan menjadi pencopet misalnya, ternyata mereka bukan tidak memiliki hambatan dan kesulitan.

Anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar serta memperoleh perawatan, pelayanan, asuhan, dan perlindungan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraannya. Anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan

dan mengembangkan potensi diri dan kemampuannya. Tidak semua keluarga dapat memenuhi seluruh hak dan kebutuhan anak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi.

Pada kenyataannya anak - anak justru tidak mendapatkan pemenuhan hak dan kebutuhan yang tertera di Undang- undang. Anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial kompleks. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, dan parkir liar. Disamping itu, adanya kakak yang bekerja bisa menjadi pendorong adik laki-laki atau perempuan untuk ikut bekerja, apalagi kakak yang bekerja menjadi anak jalanan. Berdasarkan pada permasalahan anak jalanan di kota besar bisa dipetakan latar belakang anak jalanan yang dilandasi faktor berikut :

- a. Masalah Ekonomi.
- b. Broken Home.
- c. Salah Pergaulan.
- d. Putus Sekolah.
- e. Kurang perhatian dari keluarga.
- f. Pengaruh lingkungan.

Untuk mengantisipasi menjamurnya anak jalanan, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial. Sasaran yang ditujukan pada Peraturan Daerah ini adalah

terwujudnya ketentraman sosial berdasarkan norma yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.

Dalam menangani Anak Jalanan yang ada di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru melimpahkan wewenang kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas Sosial adalah bidang Pemerintahan yang mengurus masalah – masalah sosial yang ada dilingkungan masyarakat.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru di bentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Perlindungan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Adapun seksi-seksinya terdiri dari seksi Perlindungan Korban bencana, Seksi perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia terlantar, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial, Seksi Rehabilitasi sosial dan Perlindungan Anak, Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan dan perdagangan orang, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Seksi Pemeberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Seksi Pemberdayan Keluarga Miskin, Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial berdasarkan azas otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
3. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.
4. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
5. Pengolahan dan pengelolaan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PSKS).
6. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
7. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
8. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
9. Pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat dikelurahan atau desa.

Dalam menangani Anak Jalanan Kota Pekanbaru, Dinas Sosial melimpahkan wewenang kepada Bidang Rehabilitasi sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan anak. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan fungsi :

1. Perlindungan pelayanan dan bagi anak terlantar juga dilakukan rehabilitasi sosial, koordinasi pelaksanaan, koordinasi pembinaan dan perumusan penyiapan bahan pelaksanaan dan bimbingan pada bidang rehabilitasi sosial.
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan dan pembinaan pelaksanaan pembinaan lanjut. Pelayanan yang bergerak dibidang sosial seperti lanjut usia yang terlantar, pemberdayaan dan bagi penyandang disabilitas dilakukan rehabilitasi sosial, anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak pidana/kekerasan atau diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, korban napza yang bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas contohnya penyandang psikotik.
3. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penyusunan dan pembinaan laporan yang dicapai.
4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan pelaksanaan tugas lain, atas petunjuk pimpinan.
5. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya.
6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2017 – 2022. Beberapa bentuk Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam upaya menangani anak jalanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti panti sosial, yaitu panti sosial yang berada di Rumbai Pesisir (Untuk PMKS).
2. Dilaksanakan pembinaan mental bagi anak jalanan.
3. Dilaksanakan bimbingan sosial, seperti ajaran tentang pengetahuan agama dan perilaku yang baik para anak jalanan.
4. Dilaksanakan pelatihan berupa keterampilan, mulai dari membuat tas, membuat asbak rokok, anyaman dan lainnya.

Program dan kegiatan pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Kota Pekanbaru Tahun 2019. Meskipun demikian apabila dimungkinkan terdapat sumber pendanaan lainnya maka dapat dilakukan sehingga pencapaian Visi organisasi dihasilkan secara optimal. Adapun program dan bentuk kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara garis besar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1 : Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2019.

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PENDANAAN
1	2	3	4
1.	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;	Rp. 235.000.000,-	APBD Kota Pekanbaru 2019
2.	Pelatihan keterampilan bagi anak disabilitas, yaitu membuat tas dari benang rajut	Rp. 260.000.000,-	APBD Kota Pekanbaru 2019
3.	Operasi sayang/razia bagi anak sekolah, wanita tuna susila, gelandang dan pengemis	Rp. 350.000.000,-	APBD Kota Pekanbaru 2019

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Pekanbaru. Pada tahun 2019, adanya 3 kegiatan yang dilaksanakan untuk pembinaan anak jalanan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak,

Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak terlalu spesifik karena dimasukkan dalam kegiatan operasi yang razia bagi anak sekolah hanya untuk dana operasional saja. Banyak dan sedikitnya Anak Jalanan yang melakukan bimbingan dan pelatihan dikarenakan tergantung dari keinginan individu tersebut untuk memilih pelatihan yang diminati.

Tujuan Penyusunan **Renstra** (Rencana Strategis) Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan OPD.

Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan peran Masyarakat serta Pemakaman yang bersih, tertib dan indah”**.

Dari Visi diatas dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.
2. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
3. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mewujudkan pemakaman yang bersih, tertib dan indah.

Upaya penanganan anak jalanan dari Dinas Sosial antara lain :

1. Usaha Represif yaitu untuk mengurangi atau meniadakan Anak Jalanan yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan gelandangan dan pengemis.
2. Razia dengan melakukan pembinaan dan penertiban terhadap anak jalanan, dan berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penertiban kota melalui kegiatan razia secara rutin terhadap anak jalanan yang berkeliaran ditempat-tempat umum seperti persimpangan, traffick light, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya.
3. Penampungan sementara untuk diseleksi dan pendataan bagi anak jalanan dengan tujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan, dan bimbingan agar dapat merubah sikap mental anak jalanan dari keadaan yang non produktif menjadi produktif.
4. Pendidikan dan pelatihan. Dari hasil seleksi dan identifikasi, pendataan anak jalanan yang penduduk Kota Pekanbaru akan diberi bimbingan, pendidikan latihan baik fisik, mental maupun serta keterampilan kerja untuk menunjang kehidupannya. Sedangkan pendatang yang bukan dari Kota Pekanbaru di pulangkan ketempat asalnya.
5. Pemulangan kedaerah asal bagi anak jalanan yang tidak berdomisili di Kota Pekanbaru yang pada umumnya berasal dari Provinsi tetangga.
6. Melakukan himbuan-himbuan kepada masyarakat baik melalui media massa yang anatara lain media cetak maupun media elektronik, pemasangan billboard dan penyebaran sticker ditempat-tempat umum dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sama dalam penertiban anak jalanan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan pihak kepolisian. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi peraturan Daerah, dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Daerah atau Aparatur lainnya.

- b. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah.

Wewenang dari satuan polisi pamong praja pasal 6 PP No 6 Tahun 2010:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Selain itu masalah terhadap anak-anak yaitu maraknya anak jalanan yang tersebar di kota-kota besar, adanya permasalahan anak jalanan diantaranya kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perlindungan, kasih sayang kesehatan, makanan, minuman dan pakaian. Sebagainya contoh, makin meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru yang seharusnya berada dibangku pendidikan, namun karena banyak faktor, terpaksa harus turun ke jalan demi sesuap

nasi hanya untuk bertahan hidup, menyebabkan masalah sosial. Berikut Tabel 1.1 tentang jumlah anak jalanan yang terjaring di Kota Pekanbaru dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel I.2 Jumlah Anak Jalanan yang terjaring di Pekanbaru Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	Tahun					
		2017	%	2018	%	2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pekanbaru Kota	78	54,92	76	44,18	75	40,32
2.	Sukajadi	19	13,38	10	5,81	10	5,37
3.	Rumbai	15	10,56	18	10,46	25	13,44
4.	Bukit Raya	2	1,40	8	4,65	8	4,30
5.	Payung Sekaki	2	1,40	10	5,81	12	6,45
6.	Sail	3	2,11	11	6,39	15	8,06
7.	Tampan	3	2,11	7	4,06	7	3,76
8.	Rumbai Pesisir	1	0,70	5	2,90	5	-2,68
9.	Senapelan	2	1,40	7	4,06	8	4,30
10.	Tenayan Raya	3	2,11	2	1,16	2	1,07
11.	Marpoyan Damai	7	4,92	9	5,23	10	5,37
12.	Lima Puluh	7	4,92	9	5,23	9	4,83
	Jumlah	142	100	172	100	186	100

Sumber : KPAID Kota Pekanbaru, 2019.

Dari data diatas terlihat adanya peningkatan yang terjadi setiap tahunnya, di tahun 2017 jumlah yang terjaring sebanyak 142 orang, kemudian meningkat di tahun 2018 sebanyak 172 orang dan meningkat lagi di tahun 2019 sebanyak 186 orang.

Berdasarkan tabel I.1 terkait jumlah anak jalanan yang terjaring di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2019. Dimana dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 angka tertinggi terdapat di Kecamatan Pekanbaru Kota yang berjumlah 75 anak jalanan, dari 75 anak jalanan yang dibina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebanyak 28 anak jalanan, dan sisanya 47 anak jalanan, dimana anak jalanan tersebut tidak mau dibina.

Disini juga bahwasannya jumlah 47 anak jalanan yang tidak mau dibina dikarenakan bahwasannya pendapatan mereka lebih besar di jalanan dibandingkan mereka harus melakukan atau mengikuti pembinaan yang diberi oleh Dinas Sosial tersebut, oleh sebab itu anak jalanan tersebut mengikuti pembinaan hanya sekali saja.

Berikut Tabel I.2 tentang jumlah anak jalanan yang telah dibina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 : Jumlah Anak Jalanan yang telah dibina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2015 – 2019.

No	Kategori PMKS	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Anak Jalanan	54	104	65	9	28

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah anak jalanan yang dibina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Jumlah anak jalanan yang dibina, dengan jumlah

tertinggi pada tahun 2016, dengan jumlah 104 orang anak jalanan. Dan jumlah anak jalanan yang dibina, dengan jumlah yang terendah pada tahun 2018, dengan jumlah 9 orang anak jalanan.

dapat disimpulkan bahwa Anak Jalanan di Kota Pekanbaru memang mengalami kenaikan namun anak jalanan tersebut belum tertangani keseluruhan oleh pihak Dinas Sosial sehingga saat ini jumlahnya cukup banyak.

Sepanjang tahun 2019 Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) yaitu pemantauan dan penanganan terhadap Anak jalanan. Kegiatan ini dilakukan selama 20 hari kerja/perbulan. Tim TRC dibagi menjadi dua tim satu tim terdiri dari empat orang. Pemantauan dan penanganan ini dilakukan pada pagi hari pukul (10.00 WIB s/d 12.00 WIB) dan sore hari pukul (14.00 WIB s/d 16.00 WIB). Tim TRC wajib menangani atau merespon kasus yang terjadi diluar jam kerja (tim siap on call).

Tabel 1.4 : Pelaksanaan kegiatan TIM reaksi Cepat (TRC) tahun 2020

No	Jenis Kegiatan	Lokasi
1	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah pintu masuk bandara SSK II
2	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah marpoyan
3	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah pasar pagi arengka
4	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah arengka II tabek gadang
5	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah SKA
6	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah sigunggung/jl. Durian
7	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah polda
8	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah Gramedia nangka
9	Pemantauan dan Penanganan	Persimpangan lampu merah harapan raya
10	Pemantauan dan Penanganan	Pasar Ramayana
11	Pemantauan dan Penanganan	Komplek Masjid An-Nur

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak titik lokasi anak jalanan yang perlu ditangani oleh Dinas Sosial. titik lokasi yang paling banyak di temukan Anak Jalanan yaitu persimpangan Mall SKA, Persimpangan Tabek Gadang dan persimpangan lampu merah menuju Bandara SSK II.

Sedangkan sebagai bentuk kegiatan pelatihan keterampilan ataupun bimbingan yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dilihat I.4 berikut ini :

Tabel I.5 : Kegiatan Pembinaan Bagi Anak Jalanan Kota Pekanbaru

No	Pembinaan	Kegiatan Bimbingan
1	2	3
1	Pembinaan Mental	Dengan cara melakukan pendekatan berupa sharing atau diskusi serta musyawarah untuk melihat kemauan apa yang ada pada anak jalanan berupa pendidikan agama dan akhlak
2	Pembinaan Sosial	Bimbingan Sosial bentuk pengajaran dan diskusi tentang norma sosial
3	Pembinaan Keterampilan	Pelatihan keterampilan olah pangan, sol sepatu dan kerajinan.

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2019 yaitu adanya Pembinaan Mental, Sosial dan Keterampilan. Dalam upaya pelaksanaan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada dasarnya sudah memiliki *Standar Operating Prosedures* (SOP), bentuk pembinaan tersebut berupa Pembinaan Mental, sosial dan pembinaan keterampilan. Dimana bentuk pembinaan anak jalanan inilah yang menjadi objek peneliti. Dan didalam menangani anak jalanan yang dibina saat ini, Dinas Sosial telah

menyediakan SELTHER penampungan (sementara) yang terletak di Jl. Datuk Wan Abdurahman. Dimana Selther penampungan itu hanya boleh menampung selama 7 hari. Adapun di Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai Panti BALSENPEKA. Dimana Panti BALSENPEKA ini adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pembinaan ini dilakukan dengan berbagai cara sehingga anak-anak ini dibina sampai berhasil. Tetapi, pembinaan hanya untuk kalangan anak-anak yang berurusan dengan hukum saja bukan khusus untuk pembinaan anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru.

Usaha pembinaan lanjutan Dinas Sosial dengan anak jalanan hasil penertiban yaitu dengan mengembalikan anak kepada pihak keluarga, disebabkan keluarga adalah tempat yang terbaik untuk memberikan pola asuh kepada anak, disamping itu pekerja sosial dari Dinas Sosial akan mendampingi secara berkala untuk diberikan penguatan-penguatan kepada keluarga.

Upaya lain dari Dinas Sosial yaitu dengan memberikan bimbingan pembinaan dan pelatihan terhadap anak jalanan. Pembinaan ini terdiri dari pembinaan keterampilan kepada anak dan mengembalikan anak jalanan untuk bersekolah lagi jika anak itu putus sekolah. Namun upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada anak jalanan, belum memberikan solusi yang efektif bagi permasalahan anak jalanan karena lihat kondisi dilapangan ada saja anak-anak jalanan yang masih berada dijalanan. Demi menjalankan regulasi yang ada maka butuh partisipasi dari pihak masyarakat yang dapat membantu menangani

terkait anak jalanan. karena penanganan anak jalanan bukan hanya terletak dipihak Pemerintah Kota saja namun semua elemen masyarakat dapat ikut andil didalamnya.

Dari hasil data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk para anak jalanan tersebut juga masih ada yang terjaring razia beberapa kali dan kembali melakukan kegiatan di jalanan. difenomena ini tentunya menjadi perhatian dari berbagai pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis menemukan fenomena yang terjadi pada Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang ditemukan oleh penulis yaitu :

1. Fakta yang didapatkan oleh peneliti dilapangan bahwasannya program dan kegiatan yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru salah satunya adalah “adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti Panti Sosial yaitu panti sosial yang berada di Rumbai Pesisir”. Tetapi pada kenyataannya, panti sosial itu belum ada, yang ada hanya SELTHER penampungan yang hanya bisa menampung maksimal 7 hari.
2. Dinilai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum optimal, pasalnya anak jalanan masih banyak dijumpai di jalan-jalan, perempatan lampu merah merah, restoran, mall, dan tempat-tempat umum lainnya, apalagi bulan ramadhan anak jalanan seketika meningkat pesat dan anak jalanan tersebut datang dari berbagai daerah. Anak jalanan berkedok

pakaian kusam jadi pengamen, ada juga yang membawa gelas air mineral minta-minta, berpakaian badut kepada pengendara mobil maupun motor.

3. Berdasarkan fakta dilapangan peneliti menemukan bahwa Penanganan sulit dilakukan oleh Dinas Sosial karena anak jalanan menolak untuk diberikan pembinaan seperti diadakannya Pelatihan dan Keterampilan guna membina mereka agar bisa terdidik tanpa harus menjadi anak jalanan di Kota Pekanbaru.

Dilihat dari fenomena tentang pembinaan anak jalanan, maka dari itu penelitian tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan fenomena dan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini perlu menetapkan perumusan masalah agar penelitian ini terarah, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimanakah Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ?”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. **Kegunaan Teoritis**, yaitu penelitian ini diharapkan mampu untuk mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, khususnya dibidang ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi kajian ilmu yaitu Administrasi Pembangunan.
- b. **Kegunaan Praktis**, sebagai bahan masukan bagi penelitian dan pembaca, umumnya tentang “Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru”.
- c. **Kegunaan Akademis**, sebagai bahan masukan bagi pihak Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa konsep dan ketentuan - ketentuan serta aturan - aturan memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisis data, diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep Administrasi

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan aktivitasnya pasti membutuhkan atau memerlukan bantuan orang lain karena kemampuan manusia terbatas. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia juga berorientasi dengan semakin meningkatnya dengan kualitas kerja yang dihasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan, serta kerjasama kooperatif sangat penting bagi peradaban manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Selanjutnya dalam Dimock & Dimock, kata administrasi itu berasal dari kata “*ad*” dan “*minister*” yang berarti juga “*to serve*”. Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud

administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan. (Harbani Pasalong 2016;1-2).

Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri *ad* dan *ministrate*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”. Serta *administration* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan serta pengelolaan.

Menurut Siagian (dalam Wirman Syafri, 2012:9) Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2003:4) Adminitrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Silalahi (Zulkifli, 2005:20) Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya – sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut (Harbani Pasalong, 2007:4) Administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional. Tujuan secara efektif dan fisien melalui tindakan

rasional dapat terwujud bila ada perencanaan yang relastis dan benar- benar tepat, logis, dan dapat dikerjakan.

Menurut Zulkifli (2009:32) memandang administrasi sebagai suatu proses, aktivitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam seluruh bidang kegiatan organisasi.

Menurut Siagian (dalam Syafiie 2003:5) administrasi adalah sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi tersebut memberikan beberapa hal, diantaranya:

1. Pertama administrasi adalah sebagai seni yang merupakan suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak diketahui.
2. Tugas-tugas itu. Kedalam golongan peralatan dan perlengkapan termasuk pula waktu, tempat, peralatan materi, serta sarana lainnya.
3. Bahwa administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Menurut H. Nawawi (dalam Syafiie 2003-5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Waldo administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang koperatif mempunyai tingkat rasional tinggi. (dalam Zulkifli 2005:19).

Menurut Silalahi (dalam Zulkifli 2005:23) pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsur-unsur umum dalam prespektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi:

- a) Organisasi (tata kerjaan)
- b) Manajemen (tata Pimpinan)
- c) Komunikasi (tata kepegawaian)
- d) Personalia (tata keuangan)
- e) Financial (tata keuangan)
- f) Material (tata pembekalan)
- g) Relasi Publik (tata humas)

Berdasarkan kutipan – kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan serangkaian pelayanan kegiatan tata usaha kantor seperti ketik mengetik, surat menyurat, dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar tercapainya tujuan yang efisien dan efektif melalui tindakan rasional.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan wadah atau tempat yang terdapat persekutuan dua orang atau lebih didalamnya dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Ada banyak pengertian organisasi, tergantung sudut

pandang dari setiap disiplin ilmu maupun para praktisi yang membahas maupun memberikan definisi atau pun pengertian organisasi.

Menurut Stephen P. Robbins (2003:4) organisasi adalah kesatuan (*entity*) social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat didefinisikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan Bersama atau sekelompok tujuan.

Prof. Dr. Atmosudirjo organisasi itu adalah struktur ataupun rangkaian pembagian kerja maupun tata hubungan kerja antara sekelompok orang- orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Indrawijaya, 2009:3).

Menurut hasibuan (2014:120) Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut jelas disebutkan bahwa organisasi memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai dan organisasi juga merupakan wadah untuk mencapai tujuan yang diselenggarakan melalui proses administrasi.

Menurut Winardi (2009:15) organisasi merupakan sebuah system yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing – masing

subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran –sasaran atau tujuan – tujuan organisasi yang berangkutan.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005:25) organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam suatu ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Organisasi digunakan sebagai wadah pemenuhan kebutuhan atau pencapaian tujuan pribadi atau kelompok tertentu, ia juga digunakan sebagai wadah atau proses sejumlah produk dan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh banyak orang, dengan konsekuensi logis bahwa hanya organisasi yang mampu menata aspek-aspek pelayanan administrasi secara efektif dan efisien yang akan mendapat citra positif dari konsumen khususnya dari publik umumnya, (Zulkifli, 2005:16)

Massie (dalam Zulkifli 2005:26) organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Siagian (2003:59) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Handayani (2006:43), ciri-ciri organisasi adalah:

1. Adanya suatu kelompok yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lainnya saling berkaitan.
3. Tiap-tiap anggotanya memberikan sumbangan usahanya.
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas Organisasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau himpunan interaksi setiap manusia yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama terkait dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

3. Konsep Manajemen

Kata manajemen berasal dari kata Prancis *Kuno Management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga manajemen berasal dari kata Inggris yaitu *management* berasal dari kata *manage* menurut kamus *oxford* yang artinya memimpin atau membuat keputusan didalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan kata *manage* memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang didalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan tertentu.

George R. Terry (2014:9) menjelaskan “Manajemen merupakan sebuah kegiatan pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melalukannya disebut *manajer*”, kemudian adapun fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (2014:9) yang dikenal sebagai POAC yaitu sebagai berikut :

a. *Planning* (Perencanaan)

Adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karna termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Mencakup berbagai komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.

c. *Actuating* (Penggerak)

Mencakup kegiatan yang dilakukan seseorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan – tujuan dapat tercapai.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan – kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

Menurut The Liang Gie (Zulkifli & moris, 2014:28) manajemen adalah unsur yang merupakan rangkaian perbuatan mengerakkan karyawan – karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan organisasi yang bersangkutan benar-benar tercapai.

Adapun fungsi – fungsi manajemen menurut The Liang Gie (zulkifli dan moris, 2014:28) yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Pembuat keputusan
- c. Penyempurnaan
- d. Pengorganisasian
- e. Pengarahan

Menurut Made Devi Wedayanti (2018:2) Manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi

Menurut Haiman (dalam Manulang, 2004;1) Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

G. R. Terry (dalam Zulkifli 2014:18) Manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan Planing, organizing, actuating, dan controlling dimana masing-masing dibidang digunakan baik ilmu pengetahuan keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Hasibuan (2003:3) Manajemen adalah memanfaatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005:28) manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerak orang-orang dan pergerakan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai.

Menurut Syafri (2012:12) manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui fungsi-fungsi pelaksanaan manajemen. Organisasi akan baru bermakna jika telah berlangsung proses manajemen. Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan efisiensi.

Menurut Siagian (2001:1) memberikan batasan mengenai manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud yang nyata.

Dari pemaparan definisi manajemen diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni untuk mengatur ataupun memanaj yang didalamnya terdapat serangkaian aktifitas atau kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengendalian (controlling) untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran , tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi tersebut.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli 2009: 17) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota

organisasi dalam menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu dimanajemenkan.

Menurut Mangkunegara (2011;10) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Stoner (dalam Rusby 2017: 2), Manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi yang memerlukannya.

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, di samping itu efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Manajemen SDM adalah bagian dari manajemen, karena teori-teori manajemen umum menjadi dasar pembahasannya. Manajemen SDM mempunyai kekhususan dibandingkan dengan manajemen secara umum, karena yang di "*manage*" adalah manusia, sehingga keberhasilan atau kegagalan manajemen SDM ini mempunyai dampak yang sangat luas.

Rachmawati (2008: 3) memberikan definisi manajemen SDM sebagai berikut: Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. SDM tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang berkesinambungan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengintegrasian sumber daya manusia terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi.

4. Konsep Pembinaan

Secara garis besar Pembinaan merupakan sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang sudah direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup

tertentu dan juga memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka manusia akan menata ulang pola kehidupannya.

Asmaya, (2013:11) mengemukakan Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar besarnya. Cara-cara pembinaan dibagi menjadi dua yaitu pembinaan secara individual dan secara kelompok. Pembinaan individu meliputi pembinaan mental dan pembinaan watak. Sedangkan pembinaan kelompok meliputi pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu proses pembinaan karakter adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan karakter mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk merubah perilaku, meningfkatkan perilaku, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
2. Terdapat suatu proses bimbingan, pengarahan dan tindakan kepada yang dibinanya;
3. Terdapat unsur manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengawasan);
4. Output, kualitas hasil lulusan yang diharapkan.

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu proses interkait dengan berbagai tujuan organisasi Pembinaan dapat dipandang secara ssempit maupun luas Mathis (2002:112).

Poerwadarmita (2012:31) Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna memperoleh hasil yang lebih baik.

Ivancevich, (2008:46) mengemukakan, pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Pembinaan adalah sebuah proses meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Menurut Mathis (2002:307-308), mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana strategi antara lain :

1. Mengorganisasi, merupakan pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
2. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembinaan yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektifitas pembinaan.
3. Memberi pembedaan yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektifitas pembinaan di masa depan.
4. Mengatur strategi, yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus terlebih dahulu bekerjasama dengan manajemen untuk menentukan

bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis, dengan tujuan meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.

Sedangkan komponen-komponen pembinaan oleh Mangkunegara (2005:76) terdiri dari:

1. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur.
3. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.
4. Para Pembina yang profesional.
5. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Tang Dilintin (2008:58) mengemukakan Pembinaan dapat diibaratkan sebagai pelayanan. Pembinaan sebagai pelayanan itu merupakan suatu keprihatinan aktif yang nyata dalam tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang muda, serta mengangkat harga diri dan kepercayaan diri mereka. Dengan melihat pembinaan sebagai pelayanan, seorang Pembina tidak akan pernah mencari nama, popularitas, atau kedudukan dan kehormatan dengan memperlak orang muda.

Mangunhardjana (2001:37) apabila Pembinaan berjalan dengan baik maka seseorang yang telah mengikuti pembinaan akan memiliki kemampuan untuk:

- a. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya.
- b. Menganalisa situasi kehidupan dan kerjanya dari segi positif dan negatif.
- c. Menemukan masalah-masalah dalam kehidupan serta berusaha mengatasinya.
- d. Menemukan hal-hal yang sebaliknya diubah atau diperbaiki.

- e. Merenungkan sasaran yang ingin dicapai dalam hidup setelah mengikuti pembinaan.

Mangunharjana mengatakan bahwa dalam pembinaan, orang tidak sekedar dibantu untuk mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan, orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap dan kecakapan dan menekankan pada pengembangan manusia dari segi praktis, yaitu pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu :

1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan
2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Pengertian Pembinaan menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau

menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pembinaan merupakan sekumpulan rencana yang disusun dengan unsur dasar jelas, tujuan tepat dan prinsip matang yang telah dipertimbangkan sedemikian rupa agar supaya rencana yang memiliki unsur tersebut dapat menghasilkan hasil yang efektif dan efisien.

6. Konsep Anak Jalanan

Sudarsono (2009:30) Anak jalanan adalah atau gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, yang secara yuridis tidak berdomisili secara otentik. Disamping itu mereka merupakan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, menurut ukuran masyarakat pada umumnya dan sebagian besar dari mereka tidak mengenal nilai-nilai keluhuran menurut.

Suyanto (2003:20) Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.

Menurut Departemen Sosial RI (2005:15) pengertian tentang anak jalanan adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti

ekonomi, konflik keluarga, hingga faktor budaya yang membuat mereka turun kejalan.

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak berumur dibawah 16 Tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah).

Menurut Kementrian Sosial anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

Pusdatin Kesos Departemen Sosial RI menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan atau di tempat-tempat umum seperti: pedagang asongan (menjual minuman, rokok, tissue dan Koran), pengamen, tukang parker, dan lain-lain.ss

Menurut Putranto dalam Agustin (2002:32) mendefinisikan anak jalanan sebagai anak berusia 6 sampai 15 tahun yang tidak bersekolah lagi dan tidak tinggal bersama orang tua mereka, dan bekerja sehaarian untuk memperoleh penghasilan di jalanan, persimpangan dan tempat-tempat umum.

Dalam buku “Intervensi Psikososial” (Depsos, 2003:20) anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.

Menurut Ishaq (2000:16) ada tiga kategori anak jalanan, yakni: (1) mencari kepuasan; (2) mengais nafkah; (3) tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan mall.

Menurut Soedijar (2003:16) anak jalanan adalah anak usia antara 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanan dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri.

6. Konsep Kemiskinan

Secara etimologis, “Kemiskinan” berasal dari kata “Miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen sosial dan Badan Pusat Statistika mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).

Permasalahan kemiskinan untuk saat ini masih menjadi persoalan utama bagi Indonesia, walaupun dialami juga oleh hampir semua negara yang berkembang di dunia. Kemiskinan menimbulkan berbagai permasalahan kemiskinan menjadi sumber

dari banyak permasalahan sosial lainnya seperti, kriminalitas, pengangguran, kebodohan, tingkat kesehatan yang rendah, dan lain- lain.

Kemiskinan kultur disebabkan adanya faktor-faktor budaya suatu daerah sehingga seseorang tetap miskin, sedangkan kemiskinan struktural disebabkan ketidak berdayaan seseorang terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil. Kemiskinan struktural terjadi karena orang atau sekelompok orang tidak memiliki daya tawar yang kuat terhadap sistem atau tatanan sosial yang ada, serta tidak adanya akses untuk dapat membebaskan diri dari belenggu tersebut (BPS, 2009).

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan disuatu wilayah tersebut. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

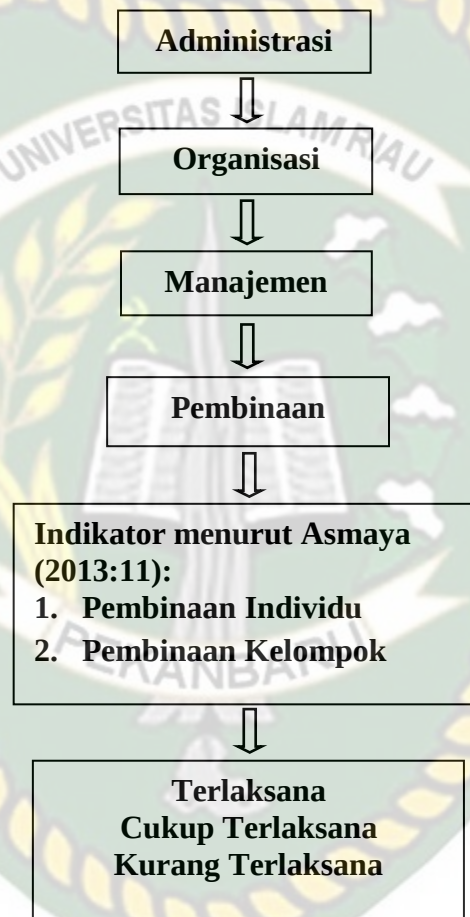
B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu terkait.

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu menjelaskan pemikiran data konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi penelitian

yang diberi judul “Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru”. Adapun kerangka pikir yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar II. 1 : Kerangka Pikir Tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



Sumber : Modifikasi penelitian, 2020

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional.

Defenisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

Maka untuk memperjelas konsep teoritis dan pengertian yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini maka penulis akan mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penulisan ini. Beberapa konsep tersebut adalah:

1. Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionabilitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi, merupakan suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut jelas disebutkan bahwa organisasi memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai dan organisasi juga

merupakan wadah untuk mencapai tujuan yang diselenggarakan melalui proses administrasi.

3. Manajemen, merupakan unsur yang merupakan rangkaian perbuatan mengerakkan karyawan – karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan organisasi yang bersangkutan benar-benar tercapai.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia, merupakan suatu proses yang berkesinambungan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengembanaan, pengintergerasian sumber daya manusia terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi.
5. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
6. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja dijalanan, anak yang bekerja dan hidup dijalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria anak jalanan adalah : menghabiskan sebagian besar waktunya dijalan maupun di tempat-tempat umum, mencari nafkah dan atau berkeliaran dijalanan maupun di tempat-tempat umum.

7. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.
8. Pembinaan Individual adalah yang dilakukan dan dibina langsung dijalanan dan turun langsung kejalanan, tujuan dari pembinaan ini untuk mendampingi, mengenal dan berdiskusi dengan anak jalanan dengan kegiatan, antara lain: konseling, diskusi dan *sharing* pengalaman.
9. Pembinaan Kelompok merupakan pembinaan dengan cara mengumpulkan para anak jalanan dan melakukan pendampingan serta mengkaji permasalahan bersama dalam konsep pengubahan sikap dan perilaku.



D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	
Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar besarnya. Cara-cara pembinaan dibagi menjadi dua yaitu pembinaan secara individual dan secara kelompok. (Asmaya, 2013:11)	Pembinaan	1. Pembinaan Individu	a. Mental, berupa pendidikan agama dan akhlak.	Terlaksana
		2. Pembinaan Kelompok	b. Watak, berupa sharing atau diskusi.	Cukup Terlaksana
			c. Kecakapan, berupa mengembangkan kecakapan yang telah dimiliki.	Kurang Terlaksana
			a. Sosial, berupa pengajaran dan diskusi tentang norma sosial.	Terlaksana
			b. Keterampilan, berupa Pelatihan keterampilan olah pangan, sol sepatu dan kerajinan.	Cukup Terlaksana
			c. Lapangan, bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperoleh pengalaman.	Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020.

E. Teknik Pengukuran

Adapun untuk melihat upaya yang dilakukan dengan melihat Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dalam penelitian ini untuk penelitian ini untuk pengukuran dari masing-masing indikator dalam Analisis Pembinaan Anak Jalanan dilakukan dengan menggunakan teori *Skala Likert*.

Menurut Sugiono (2016:93) Skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang terjadi dilokasi penelitian. Berdasarkan teori tersebut maka dapat diketahui bahwa ditetapkan ukuran: Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana terhadap seluruh indicator yang ada, dengan penilaian sebagai berikut : Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dikategorikan :

Tabel II.2 : Pengukuran Skala Likert

Options	Bobot
Terlaksana	3
Cukup Terlaksana	2
Kurang Terlaksana	1

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Rumus :

Skor Maksimal : Bobot skor tertinggi x jumlah item yang dinilai
(pertanyaan) x jumlah responden (15 orang)

Skor Maksimal : Bobot skor tertinggi x jumlah item yang dinilai
(pertanyaan) x jumlah responden (15 Orang)

Melalui rumus tersebut, maka diperoleh Skor Maksimal yaitu $3 \times 6 \times 15 = 270$, sedangkan skor minimal $1 \times 6 \times 15 = 90$, sehingga Interval Skor untuk seluruh pertanyaan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}} \\ &= \frac{270 - 90}{3} \\ &= 60 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh pengkategorian interval skor sebagai berikut :

Terlaksana	:	Apabila penilaian terhadap indikator Analisis Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 211 - 270
Cukup Terlaksana	:	Apabila penilaian terhadap indikator Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh dinas Sosial Kota Pekanbaru 151 - 210
Kurang Terlaksana	:	Apabila penilaian terhadap indikator Analaisis Pembinaan AnakJalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 90 – 150

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Individu

Pengukurannya adalah dengan memberikan 2 Pertanyaan untuk responden dengan skor tertinggi 90 dan skor terendah 30 dengan kelas interval 20 dan dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana :
Apabila penilaian terhadap indikator Pembinaan Individu berada pada skala 71 - 90

Cukup Terlaksana :
Apabila penilaian terhadap indikator Pembinaan Individu berada pada skala 51 - 70

Kurang Terlaksana :
Apabila penilaian terhadap indikator Pembinaan Individu berada pada skala 30 - 50

2. Pembinaan Kelompok

Pengukurannya adalah dengan memberikan 2 pertanyaan untuk responden dengan skor tertinggi 90 dan skor terendah 30 dengan kelas interval 20 dan dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana :
Apabila penilaian terhadap indikator Pembinaan Kelompok berada pada skala 71 - 90

Cukup Terlaksana :
Apabila penilaian terhadap indikator Pembinaan Kelompok berada pada skala 51 - 70

Kurang Terlaksana :
Apabila penilaian terhadap indikator Pembinaan Kelompok berada pada skala 30 - 50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode kuantitatif. Karena penulis ingin mendapatkan data yang akurat, berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Sedangkan tipe penelitian dalam Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru menggunakan survey deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena dan kejadian yang berlangsung dilapangan pada saat tertentu.

Menurut (Sugiyono 2014:11) Metode Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada Filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Karena untuk mempermudah penulis mendapatkan informasi dan data.

Metode Kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data yang akurat berupa angka sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis keterangan apa yang ingin diketahui. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang digunakan yaitu data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative. (Sugiyono, 2014:11).

Sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Objek Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penulis mengambil penelitian pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta Anak jalanan yang dibina. Adapun pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan fenomena yang ada beserta pengamatan penulis dilapangan mengenai anak jalanan Kota Pekanbaru dikarenakan perlunya pembinaan dari Dinas Sosial Sosial khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial terhadap anak jalanan yang dibina tersebut agar dapat mematuhi ketentuan yang telah berlaku.

Namun jika dilihat dari fenomena yang terjadi dilapangan, dimana program dan kegiatan yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru salah satunya adalah “adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti Panti Sosial yaitu panti sosial yang berada di Rumbai Pesisir”. Tetapi pada kenyataannya, panti sosial itu belum ada, yang ada hanya SELTHER penampungan yang hanya bisa menampung maksimal 7 hari. Artinya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak jalanan dinilai belum optimal seperti yang diharapkan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2016:80). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru, serta anak jalanan yang dibina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016 ; 81) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah di pelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili).

Jadi sampel merupakan suatu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan. Sampel penelitian mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat dalam membuat kesimpulan penelitian. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel populasi dan sampel penelitian dibawah ini :

Tabel III. 1: Tabel Populasi dan Sampel Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kabid Rehabilitasi Sosial	1	1	100%
2.	Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak	1	1	100%
3.	Anak Jalanan yang Dibina	28	15	53,57%
	Jumlah	31	17	54,83%

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Dinas Sosial, dilakukan *Teknik Sensus* dengan pengambilan keseluruhan populasi dijadikan sampel. Hal ini dikarenakan melihat jumlah dari keanggotaan atau pegawai Dinas tidak terlalu banyak. Menurut Sugiyono (2016:85) *sampling sensus / jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel jumlah populasinya relative kecil kurang dari 30 orang.
2. Untuk Anak Jalanan yang dibina menggunakan teknik penarikan *Purposive Sampling*. Yaitu teknik penentuan sampel yang hendak diambil, kemudian

pemulihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.

Asalkan tidak menyimpang dari sampel yang ditetapkan.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu diketahui sumber data dalam memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dan hasil penelitian dilapangan. Data primer penelitian ini berasal dari hasil wawancara diperoleh langsung dari responden dilokasi peneliti yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti. Data tentang bagaimana Informasi Analisis Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder sebagai data yang memperkuat penelitian ini yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang

meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian.

Nasir (2003:328) dalam Riduwan (2014:72) mengatakan bahan teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berpengaruh dengan fokus penelitian yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui hasil pengamatan mengenai Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hadi (dalam Sugiyono 2016 : 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menunjukan pertanyaan langsung, melakukan dialog atau percakapan kepada responden berdasarkan tujuan penyelidikan untuk memperoleh data secara langsung dari responden terkait dengan penelitian ini.

Menurut (Sudaryono, 2016:82) wawancara adalah suatu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara

ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif dan deskriptif kuantitatif.

3. Kuisisioner / Angket.

Menurut (Noor, 2012;139) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan tertulis yang akan diberikan kepada responden penelitian untuk diisi oleh responden kemudian dikembalikan kepada peneliti, yang menyangkut tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang berbentuk dokumen yang berisikan data penting, baik itu berbentuk teoritis ataupun data konkrit yang terdapat dilapangan dapat digunakan dan sangat diperlukan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

Menurut (Noor, 2010;141) dokumen merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto.

G. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari responden yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka dan skor. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau yang menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan yang ada untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan secara metode ilmiah.

Menurut Sugiyono (2016 : 244) yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan

Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kelamin	Bulan dan Minggu Tahun 2021																											
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	3	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Revisi Kuisioner																												
5	Rekomendasi Survey																												
6	Survey Lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Laporan Hasil Penelitian																												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10	Ujian Skripsi																												
11	Revisi Skripsi																												
12	Penggandaan Skripsi																												

Sumber : Olahan Penulis, 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keberadaan Geografi Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota dari Provinsi Riau. Yang mana demikian Kota Pekanbaru menjadi pusat perekonomian dan administrasi di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Dengan Luas 632.26 km² dan secara astronomis terletak diantara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- b. Timur Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- c. Selatan Pekanbaru berbatasan dengan dengan kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.
- d. dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Nama Pekanbaru dulu dikenal dengan “Senapelan” dan dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Batin. Kawasan yang awalnya berupa ladang ini berangsur-angsur menjadi desa, kemudian desa Senapelan pindah ke pemukiman baru yang kemudian diberi nama Dusun Payung Sekaki tepi muara sungai siak.

Pada tanggal 9 April 1989, telah diperbarui sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut, Belanda diberi hak yang luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapajenis dagang. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu

merupakan kawasan yang maju dan sangat penting. Karena kapal belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan sebagai Komodotif perdagangan baik dari luar untuk diangkut kepedalaman maupun dari pedalaman dibawa keluar berupa bahan tambang seperti Timah, Emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, payung sekaki atau senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi sungai siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun dari pedalaman Minang kabau dan Kampar. Hal ini juga merancang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai Daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada zaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, ia membangun istana di Kampong Bukit dekat desa Senapelan. Diperkirakan istana itu terletak di dekat Masjidil Haram saat ini. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah berinisiatif mendirikan Pekan atau Pasar Senapelan namun tidak ada kemajuan. Selanjutnya, putranya Raja Muda Muhammad Ali terus mengembangkan usahanya di tempat baru di dekat pelabuhan baru.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Iman Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah dibawah Pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazam Syah, penguasaan Senapelan di serahkan kepada Datuk Bandar dan dibantu oleh Empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi datuk bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalanya Pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang Pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

SK Kerajaan Bersluit Van Inlandsch Zelfbestuur Van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siakyang disebut District.

1. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
2. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, District menjadi UGM yang dikepalai oleh Gunco.
3. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
4. UU No 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan kabupaten Kapar, Kota Pekanbaru diberi status Kota kecil.
5. UU. No.8 tahun 1956 menyempurnakan status kota Pekanbaru sebagai kota Kecil.

6. UU no. 1 tahun 1956 status Pekanbaru menjadi kota Praja
7. Kemendagri No.52/1/44-25 tanggal 20 januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Pekanbaru Riau.
8. UU No. 8 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya Pekanbaru.
9. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebutan kota Madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntunan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dipentuknya kecamatan baru dengan dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan/Desa baru dengan Perda Baru 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke Timur. memiliki beberapa anak sungai seperti : Air Hitam, Sungai Umban Sari, Setukul, Siban, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan, Dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke Kota serta daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan januari dengan april dan September sampai dengan Desember.
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan mei sampai dengan agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring berjalannya waktu semakin banyaknya warga pendatang untuk menetapdi Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendapatan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan serta penyediaan sarana dan prasarana baikdisektor kesehatan, sector pendidikan, sector ibadah dan fasilitas umum lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota pekanbaru adalah suku Melayu, namun demikina juga terdapat suku Minang, Jawa, Batak, dan sebagainya. Mata pencarian penduduk Kota Pekanbaru adalah pegawai Pemerintah, Pegawai Swasta, serta pedagang. Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payang Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Pulih, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan,

Dan Kecamatan Rumbai Pesisir Di Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapata dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	146.960	138.972	285.932
2.	Payung Sekaki	46.476	44.426	90.902
3.	Bukit Raya	53.757	49.965	103.722
4.	Marpoyan Damai	68.104	63.258	131.362
5.	Tenayan Raya	83.837	78.693	162.530
6.	Limapuluh	21.138	21.331	42.469
7.	Sail	10.994	11.021	22.015
8.	Pekanbaru Kota	13.032	12.687	25.719
9.	Sukajadi	24.115	24.429	48.544
10.	Senapelan	18.590	18.869	37.459
11.	Rumbai	35.370	32.200	67.570
12.	Rumbai Pesisir	37.544	35.320	72.864
Total		559.917	531.171	1.091.088

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 1.091.088 yang terdiri dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, dan berikut ini jumlah data penduduk menurut kelompok umur yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jumlah Pendudukan Menurut Umur Berdasarkan Kecamatan Di Kota Pekanbaru		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	57.467	52.551	110.018
2.	5-9	50.281	46.149	96.430
3.	10-14	45.936	42.572	88.513
4.	15-19	51.290	52.497	103.787
5.	20-24	62.368	61.252	123.620
6.	25-29	53.560	50.689	104.249
7.	30-34	47.116	45.895	93.001
8.	35-39	44.801	43.317	88.118
9.	40-44	41.152	38.297	79.449
10.	45-49	34.885	30.560	65.445
11.	50-54	26.061	23.175	49.239
12.	55-59	18.971	17.780	36.751
13.	60-64	11.895	10.464	22.359
14.	65+	14.134	15.968	30.102
Total		559.917	531.171	1.091.088

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk yang paling banyak berada pada umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 123.620 jiwa dan jumlah penduduk yang paling banyak berikutnya terdapat pada umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 110.018 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada umur 60-64 tahun yaitu sebanyak 22.359 jiwa pada tahun 2021.

3. Pemerintah Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur, Penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada kator Walikota pekanbaru, susunan organisasi Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris walikota, dan masing-masing kepala seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman Dan Ketertiban, Seksi Pembangunan, Dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan, lima puluh delapan Kelurahan serta Enam ratus delapan puluh RW dan dua ribu delapan ratus lima puluh RT yang ada di Kota Pekanbaru, adapun nama Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tampan Yang Terdiri Dari Empat Kelurahan Yaitu Kecamatan Tampan Yang Terdiri Dari Empat Kelurahan Yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tua Karya, Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki Yang Terdiri Dari Empat Kelurahan Yaitu Kelurahan Labuh Baru Timur, Kelurahan Tampan, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Labuh Barat. Kecamatan Bukit Raya Yang Terdiri Dari Empat Kelurahan Yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan Tangkerang Utara, Dan Kelurahan Tangkeran Labuai. Kecamatan Marpoyan Damai Yang Terdiri Dari Lima Kelurahan Yaitu Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Rejosari, Dan Kelurahan Ail. Kecamatan Sail Yang Terdiri Tiga Kelurahan Yaitu Kelurahan Cita Raya, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan

Sukamulya. Kecamatan Sukajadi Terdiri Dari Tujuh Kelurahan Yaitu Kelurahan Kampong Tengah, Kelurahan Kampong Melayu, Kelurahan Kendung Sari, Kelurahan Harjosari, Kelurahan Sukajadi, Dan Kelurahan Pulau Karam. Kecamatan Rumbai Yang Terdiri Dari Lima Kelurahan Yaitu Kelurahan Lembun Sari, Kelurahan Muara Fajar, Kelurahan Rumbai Bukit, Kelurahan Palas, Dan Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Lima Puluh Yang Terdiri Dari Empat Kelurahan Yaitu Kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, Kelurahan Tanjung Rhu, Dan Kelurahan Pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari enam kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Sumahilang, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Suka Ramai, Dan Kelurahan Kota Tinggi. Kecamatan Rumbai Pesisir Yang Terdiri Dari Enam Kelurahan Yaitu Kelurahan Meranti Pendek, Kelurahan Limbungan, Kelurahan Lembah Sari, Kelurahan Limbungan Baru, Dan Kelurahan Tebing Tinggi.

B. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajahan Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Dengan masih ingin menjajah kembali Indonesia maka belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia, pejuang Indonesia sedikitpun tak bergeming dengan gertakan Belanda, malah kembali menggertak Belanda dengan semboyan merdeka atau mati.

Terjadi pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat heroik, dimana pejuang Indonesia rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkannya, sementara penjajah Belanda yang selama ini telah mendapat keuntungan dan kekayaan yang melimpah dari bumi Indonesia tidak rela melepas begitu saja, maka terjadilah pertempuran yang begitu dahsyat, peristiwa itu terjadi antara tahun 1947-1950.

Dampak peristiwa ini menimbulkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan, dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut hari kesetiakawanan sosial yang jatuh pada 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini Pemerintah Republik Indonesia setiap tanggal 22 desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu Instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial muali dari pusat sampai kedaerah- daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan.

Pada tahun 1950 inspeksi sosial ditukar dengan jawatan sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang para veteran pejuang, kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat, Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974 jawatan sosial diganti dengan Departemen Sosial RI, untuk tingkat pusat dan tingkat Provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi yang di kepalai oleh seorang kepala Departemen, sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota disebut kantor Departemen sosial kabupaten/kota, untuk tingkat kecamatan disebut petugas Sosial kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Pada tahun 1998 Departemen Sosial RI, dibubarkan oleh Presiden RI yaitu K.H, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas.

Pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada Tahun 2002 berganti nama lagi menjadi Departemen Sosial dan Kesehatan RI karena digabungkan dengan Departemen Kesehatan. Pada tahun 2001 tepatnya pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri Departemen Sosial RI dikembalikan lagi pada posisi semula. Untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan 39 Pemakaman Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Nomor 07 tahun 2001.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas Sosial kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial dan yang pada saat ini di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 orang, sekretaris 2 orang, Kepala Bidang (kabid) 3 orang, 9 Kepala Seksi dan tenaga jabatan fungsional lainnya. disamping itu Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga mempunyai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

Tujuan:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian.
- b) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran:

- a) Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan PMKS.
- b) Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat.
- c) Mewujudkan reformasi birokrasi.
- d) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Sosial Kota Pekanbaru akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Adapun Visi Dinas Sosial

Kota Pekanbaru adalah Sebagai berikut : **“Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan peran Masyarakat serta Pemakaman yang bersih, tertib dan indah ”.**

Misi adalah mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan sejalan dengan upaya pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi objek. Maka Misi perkembangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah :

- a. Mewujudkan pemakaman yang bersih, tertib dan indah.
- b. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.
- d. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu sistem pembagian tanggung jawab, wewenang serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan ini hendaknya dicapai semaksimal mungkin dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki walaupun potensi tersebut terbatas. Berikut ini struktur organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
 - b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - 2) Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial
 - 3) Seksi Perlindungan Dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - 3) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Korban Tidak Kekerasan Dan Perdagangan Orang
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 - 3) Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial
 - f. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)
- 1. Kepala Dinas Sosial**
Tugasnya :
- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial.
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial.
 - c. Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial.
 - d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
 - e. Membina unit pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugasnya :

- a. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Memfasilitasi asistensi tugas secretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi, dan bimbingan teknis.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- e. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
- f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawabana dinas.
- h. Mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.
- i. Mengevaluasi tugas sekretaris berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas secretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- k. Mengkoordinasi, membina, pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor.
- l. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan, dan menyusun program dinas.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugasnya:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan baha penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bantuan jaminan sosial, advokasi sosial.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosial, kerusuhan massa.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian dan pengawasan pengumpulan bantuan sosial.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan Perlindungan dan Penyatunan Lanjut Terlantar.
- e. Mengkordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas.

- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugasnya:

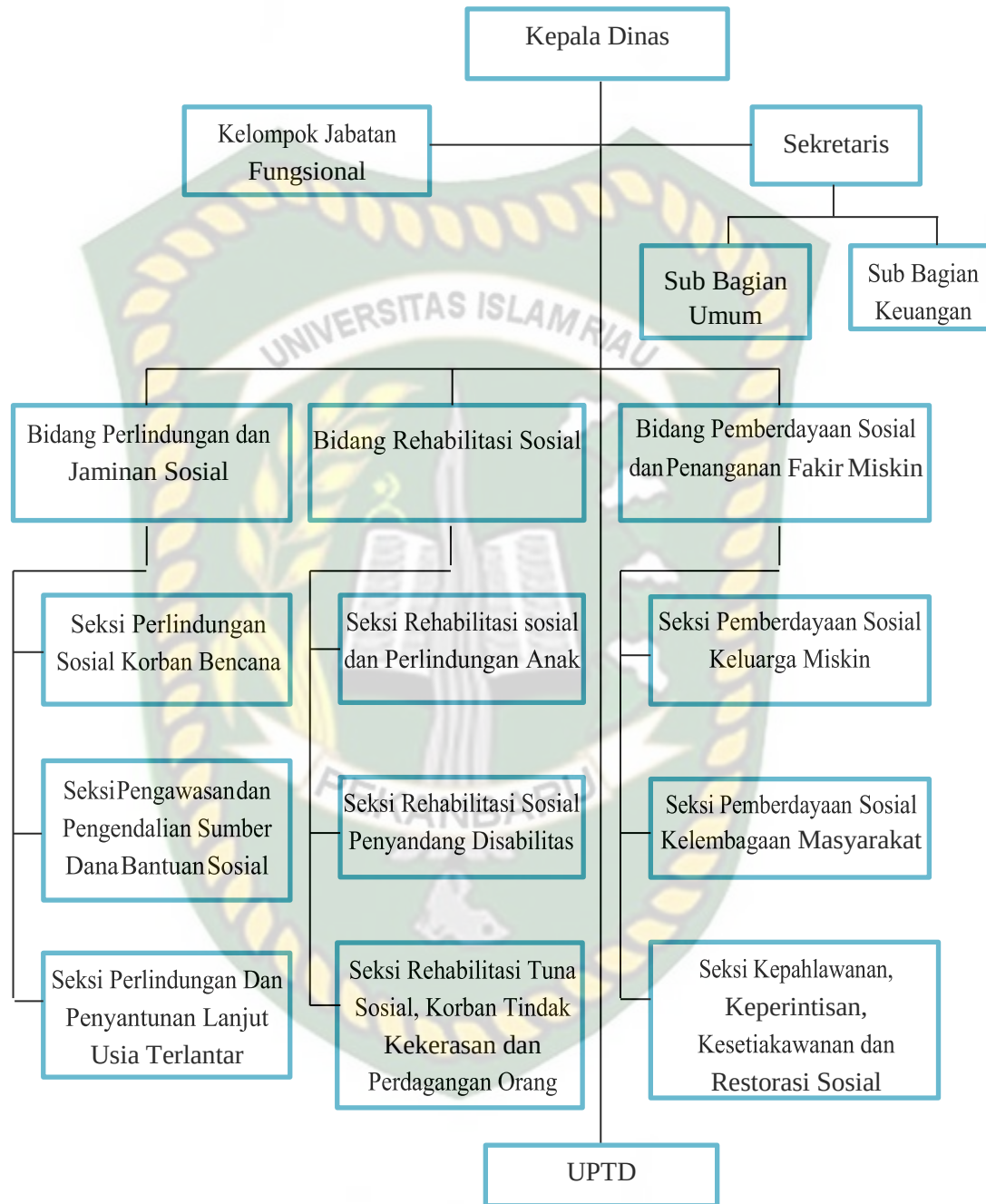
- a. Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial.
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan / diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, tuna sosial, kaum minoritas, penyandang psikotik.
- c. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- d. Mengkoordinasi, membina, merumuskan memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kerja bawahan.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pemimpin.
- f. Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tugasnya:

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- c. Pengkoordinasian inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di bidang tugasnya.
- d. Pengkoordinasian dan perumusan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial.
- e. Pengumpulan bahan kegiatan penyulihan.

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber : Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

C. Sejarah Pembentukan Satuan Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. satuan polisi pamong praja dapat berkedudukan di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota, satuan polisi pamong praja di pimpin oleh kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Polisi pamong praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas pemerintah daerah. Sebelum menjadi satuan polisi pamong praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu di bentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan

para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian di revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 148 UU No.32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentuan masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi sebagai tindak lanjut dari UU No.32 tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 34 tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok satuan polisi pamong praja Provinsi Riau. Selain itu satuan polisi pamong praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula satuan polisi pamong praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kota Pekanbaru Yang Tentram, Tertib Dan Taat Hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamain rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertera dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Tata hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Misi: Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

1. Susunan Organisasi

Satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru di Kepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh empat orang Pejabat Eselon IV yang diantaranya adalah:

- a. Kasabug Tata Usaha.
- b. Kasi Operasional.
- c. Kasi Pembinaan dan Kapasitas.
- d. Kasi PPNS.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas dalam penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi peraturan Daerah, dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Aparatur lainnya.

3. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang sebagai berikut:

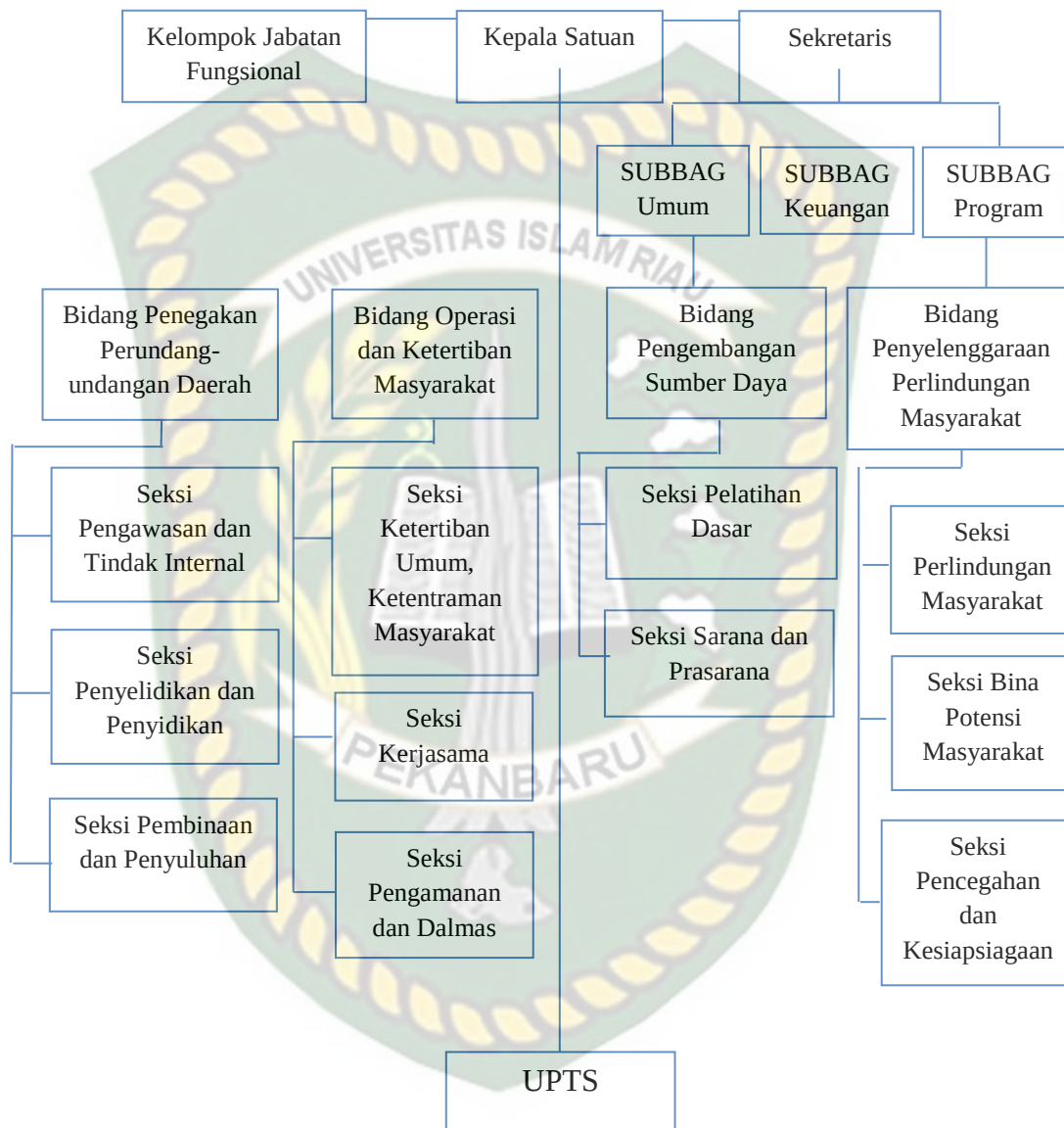
- a. Melakukan tindakan penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Kepala Daerah.

- b. Menindak Warga/ Masyarakat, Aparatur/ Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran dan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga Masyarakat / Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.



D. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru



Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru 2020

Adapun tugas dari masing-masing tersebut diatas adalah:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas:
 - a) Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kebijakan atau keputusan kepala daerah
 - b) Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
 - c) Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta kebijakan atau keputusan kepala daerah
 - d) Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS atau aparatur lainnya
 - e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas:
 - a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan
 - b) Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana
 - c) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
 - d) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, dan perjalanan dinas
 - e) Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya, serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan
 - f) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala kepala satuan
 - g) Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya
 - h) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program
 - i) Menyenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program satuan
 - j) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan satuan polisi pamong praja

- k) Mewakili kepala satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat
 - l) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan satuan
 - m) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
 - n) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan tahunan dan evaluasi sebagai pertanggung jawaban satuan
 - o) Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
 - p) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
 - q) Mengevaluasi tugas sub bagian tata usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
 - r) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan
 - s) Memfasilitasi dan asistensi tugas sub bagian tata usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
 - t) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Seksi Operasional mempunyai Tugas:
- a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
 - b) Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum
 - c) Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional
 - d) Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, satuan kerja perangkat daerah, atau lembaga terkait lainnya
 - e) Merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan kesamaptaan
 - f) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
 - g) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
 - h) Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis

- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas mempunyai Tugas:
 - a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil polisi pamong praja, pendidikan dan latihan
 - b) dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja
 - c) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas
 - d) Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan keputusan wali kota
 - e) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
 - f) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi pembinaan pengembangan kapasitas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
 - g) Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi pembinaan pengembangan kapasitas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
 - h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 5. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai Tugas:
 - a) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota
 - b) Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan
 - c) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan
 - d) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka mengembangkan kemampuan PPNS
 - e) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
 - f) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
 - g) Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi penyidik pegawai negeri sipil dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
 - h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab V ini akan dibahas mengenai identitas responden, hasil penelitian, serta pembahasan masing-masing indikator penelitian.

A. Identitas Responden

Identitas responden digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian, selain itu juga diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas antara data responden dengan analisis yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, seperti melalui wawancara dan kuisioner. Untuk tahap awal analisa data, maka yang pertama dilakukan adalah mengenai karakteristik dan responden. Hal ini bertujuan agar dapat mengidentifikasi tingkatan pada populasi yang dijadikan responden pada penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang, Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, dan juga menyebarkan kuisioner sebanyak 18 rangkap.

Adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dijelaskan perlu untuk dijelaskan pada penelitian ini diantaranya berdasarkan jenis kelamin, dan umur.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, jenis kelamin juga mempengaruhi emosional dan kinerja responden yang bersangkutan dalam bekerja. Untuk lebih jelas identitas responden Pembinaan Anak Jalanan Kota Pekanbaru bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1: Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Pada Pembinaan Anak Jalanan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	10	58,82 %
2	Perempuan	7	41,17 %
Jumlah		17	99,99%

Sumber: Olahan Data Peneliti 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden Pembinaan Anak Jalanan Kota Pekanbaru jika dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 9 orang dengan presentase 60% Dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang dengan presentase 40 %.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan. Usia juga merupakan satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa

seseorang yang memiliki usia yang lebih tua kemampuan fisiknya akan jauh berbeda dari seseorang yang lebih muda seperti lebih mudah kelelahan dalam melakukan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut :

Tabel V.2: Distribusi Jumlah Responden Anak Jalanan Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	5-10	12	70,58%
2	11-15	3	17,64%
3	>20	2	11,76%
Jumlah		17	99,96%

Sumber: Olahan Data Peneliti 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk responden yang berusia berkisar 5-10 sebanyak 12 orang dengan presentase 80% kemudian yang berusia 11-15 sebanyak 3 orang dengan presentase 20%, kemudian >20 tidak ada.

B. Pembahasan hasil penelitian tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dalam pembahasan pada BAB ini, diuraikan hasil penelitian tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota pekanbaru. Peneliti mendapatkan data berupa hasil observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan mewawancarai Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Rehabilitasi, Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan

Anak, dan Kuisioner yang peneliti lakukan dengan menyebar kuisioner kepada responden anak jalanan yang telah dibina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan beberapa tolak ukur dari indikator teori yang menjadi acuan yaitu, Pembinaan Individu, dan Pembinaan Kelompok.

1. Pembinaan Individu

Pembinaan Individu adalah yang dilakukan dan dibina langsung dijalanan dan turun langsung kejalanan, tujuan dari pembinaan ini untuk mendampingi, mengenal dan berdiskusi dengan gelandangan dan pengemis atau disebut anak jalanan, dengan kegiatan, antara lain: konseling, diskusi dan *sharing* pengalaman.

Untuk dapat mengetahui tentang bagaimana Analisis Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden melalui indikator Pembinaan Individu, untuk dapat melihat penilaian responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3: Distribusi Tanggapan Responden Pembinaan Anak Jalanan Mengenai Indikator Pembinaan Individu Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Mental, berupa pendidikan agama dan akhlak	9	4	2	15 anak jalanan
2	Watak, berupa sharing atau diskusi	7	6	2	15 anak jalanan
3	Kecakapan, berupa mengembangkan kecakapan yang telah dimiliki	3	7	5	15 anak jalanan
Jumlah		19	17	9	45
Skor		57	34	9	100

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2021

Rumus : Skala tertinggi x jumlah pertanyaan x banyak responden

$$3 \times 3 \times 15 = 135$$

Skala terendah x jumlah pertanyaan x jumlah responden

$$1 \times 3 \times 15 = 45$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{135-45}{3} \\ &= 30 \end{aligned}$$

Terlaksana : 106 - 135

Cukup Terlaksana : 76 - 105

Kurang Terlaksana : 45 - 75

Berdasarkan Tabel V.3a dapat dijelaskan bahwa mengenai pembinaan anak jalanan pada indikator Pembinaan Individu berdasarkan pada point pertama berupa pendidikan agama dan akhlak pada skala Terlaksana sebanyak 9 Responden dengan alasan bahwa pendidikan agama dan akhlak yang diberikan oleh Dinas Sosial sudah dilakukan dengan baik, sedangkan untuk skala Cukup Terlaksana 4 Responden dan Kurang Terlaksana 2 Responden.

Kemudian Pada point kedua kegiatan sharing atau diskusi pada skala Terlaksana terdapat 7 Responden yang menjawab dengan alasan bahwa kegiatan diskusi atau sharing sudah cukup jelas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dinas Sosial, selanjutnya 6 Responden sudah menjawab Cukup Terlaksana dan yang menjawab Kurang Terlaksana 2 Responden.

Pada point ketiga kecakapan, berupa pengembangan kecakapan yang telah dimiliki yang menjawab Terlaksana 3 Responden dengan alasan bahwa Dinas Sosial

sebelumnya sudah melakukan pembinaan kecakapan kepada anak jalanan tersebut, 7 Responden yang menjawab Cukup Terlaksana dan 5 Responden menjawab Kurang Terlaksana.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan terhadap indikator Pembinaan Individu berada pada jumlah Skor 100, berada pada kategori “Cukup Terlaksana” dalam skala interval 76-105. Maka dari itu untuk Pembinaan Individu kedepannya perlu ditingkatkan dan diperbaiki lagi agar menghasilkan pembinaan yang lebih baik dan benar-benar akan merasakan dampak atas program pembinaan tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana pegawai dari Dinas Sosial melakukan kegiatan pembinaan anak jalanan, berikut ini wawancara penulis dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial **Bapak Bustami** pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 11.15 WIB

“Kami selalu mengajak masyarakat untuk tidak memberi sumbangan kepada anak jalanan karena bisa membuat kebiasaan terhadap anak jalanan, terlebih lagi membuat anak jalanan menjadi malas karena dengan mengharapkan belas kasihan kepada orang lain mereka mendapatkan uang. Kendala pada kami mereka dibina 3-7 hari setelah dilakukan pembinaan selang dua hari mereka turun lagi ke jalanan dan begitu seterusnya, karena kami tidak boleh memberikan sanksi. Sanksi disini sudah

ada didalam peraturan derah denda 50 juta dan kurungan waktu 3 bulan tapi ini tidak pernah dilakukan karena tidak ada anti tipiring (*Tindak Pidana Ringan*)”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan anak dalam Pembinaan Individu **Ibu Fajrina** pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 10.30 WIB.

“Sumber daya manusia pada Dinas Sosial dibagi atas tim pemantauan dan penanganan, kegiatan tim reaksi cepat (TRC). Kegiatan ini dilakukan selama 20 hari kerja/bulan. Tim TRC dibagi menjadi 2 tim, satu tim terdiri dari 4 orang. Pemantauan dan penanganan dilakukan pada pagi hari pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB dan sore hari pukul 14.00 WIB s/d 16.00 WIB. Tim TRC wajib menangani atau merespon kasus yang terjadi diluar jam kerja. Sumber Daya di Dinas Sosial sendiri masih kurang, kami juga memiliki tim relawan untuk membantu proses kegiatan dilapangan dan sebenarnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kebijakan ini. Tetapi anak jalanan dan masyarakat lah yang masih belum paham dan mengerti dengan aturan yang sudah diterapkan inilah yang mengakibatkan anak jalanan masih banyak berkeliaran di Kota Pekanbaru dan masyarakat yang masih suka memberi. Ini yang menjadikan dinas sosial kurang efisien dalam menjalankan tugasnya masing-masing terlebih lagi anak jalanan yang tertangkap tidak pernah merasakan efek jera.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, disini peneliti melihat bahwasannya dari pembinaan individu yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melakukan Pembinaan terhadap Anak Jalanan Cukup Terlaksana hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bustami dan ibu Fajrina yang menjelaskan bahwasannya sudah melakukan sesuai dengan Peraturan yang mengatur terkait tentang pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak dan hasil observasi peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwasannya Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru berada pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah skor 100 dalam skala interval 76-105, maka untuk indikator pembinaan individu Dinas Sosial telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

2. Pembinaan Kelompok

Pembinaan Kelompok, yakni Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Untuk itu Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan melakukan pembinaan kelompok secara rutin setiap minggunya untuk menyempurnakan tugas agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pembinaan Kelompok merupakan pembinaan dengan cara mengumpulkan para anak jalanan dan melakukan pendampingan serta mengkaji permasalahan bersama dalam konsep perubahan sikap dan perilaku.

Untuk melihat pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.4: Distribusi Tanggapan Responden Pembinaan Anak Jalanan Mengenai Indikator Pembinaan Kelompok Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Sosial, berupa pengajaran dan diskusi tentang norma sosial	7	6	2	15 anak jalanan
2	Keterampilan, berupa pelatihan keterampilan olah pangan, sol sepatu, dan kerajinan	2	7	6	15 anak jalanan
3	Lapangan, untuk mendapatkan pengetahuan dan memperoleh pengalaman	7	6	2	15 anak jalanan
Jumlah		16	19	10	45
Skor		48	38	10	96

Sumber : Olahan Data Peneliti 2021

Pada tabel V.4a dapat dijelaskan bahwa mengenai pembinaan anak jalanan pada indikator Pembinaan Kelompok sesuai dengan standar berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada 15 Reponden kepada Anak jalanan yang dibina, pada item

pertama yaitu Sosial, berupa pengajaran dan diskusi tentang norma sosial terhadap anak jalanan sebanyak 7 Responden menjawab Terlaksana dengan alasan bahwa setiap kegiatan berlangsung Dinas Sosial memang melakukan pembinaan hal ini terlihat dari Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungannya langsung yang turun ke lapangan, selanjutnya yang menjawab pada skala Cukup Terlaksana ada sebanyak 6 dan yang menjawab Kurang Terlaksana 2 responden.

Untuk item kedua yaitu pembinaan anak jalanan berdasarkan Keterampilan, berupa pelatihan keterampilan dan kerajinan pada skala Terlaksana ada 2 Responden yang menjawab Terlaksana dengan alasan pada saat melakukan pembinaan Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan telah melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh atasannya, selanjutnya pada skala Cukup Terlaksana sebanyak 7 Responden dan pada skala Kurang Terlaksana sebanyak 6 Responden.

Untuk item ketiga yaitu Lapangan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperoleh pengalaman pada skala terlaksana ada 7 Responden yang menjawab Terlaksana dengan alasan pada saat melakukan pembinaan Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak telah melakukan tugasnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh atasannya, selanjutnya pada skala Cukup Terlaksana sebanyak 6 Responden dan pada skala Kurang Terlaksana sebanyak 2 Responden.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan diatas, selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas

Sosial Kota Pekanbaru untuk indikator Pembinaan kelompok berada pada rentang total skor 96 dalam skala interval 76-100 berada pada kategori “Cukup Terlaksana”, maka dari itu Pembinaan Kelompok kedepannya perlu ditingkatkan lagi agar lebih menghasilkan kegiatan yang baik dan dapat membantu program-program pembinaan yang anak jalanan benar-benar akan merasakan dampak atas program pembinaan tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana pegawai dari Bidang Rehabilitasi sosial dalam melakukan Pembinaan, berikut ini wawancara penulis dengan Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak **Ibu Fajrina** pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 10.30 WIB.

“Ada, pembinaan itu tetap kita jalankan. Hanya saja Shelter penampungannya hanya berlaku untuk 1-7 hari saja, maka dari itu pembinaan itu tidak berjalan secara maksimal. Anak jalanan itu berbeda dengan anak terlantar, kategori anak jalanan itu mempunyai orangtua, sedangkan anak terlantar tidak mempunyai orangtua. Pernah pada waktu itu anak jalanan mencuri disebuah ruko, dan polisi menyerahkan kepada kami untuk dibina karena dia anak dibawah umur, dan dia hampir mengalami gangguan mental. Anak itu terpisah oleh orangtuanya sudah dua tahun, lalu kami bina selama 7 hari setelah itu kami titipkan ke balai ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) tetapi balai tidak menerimanya dan kami titipkan di Panti Asuhan punya Yayasan, kami cari orangtuanya dan sekarang anak itu sudah sehat kembali dan sudah ketemu dengan orangtuanya.”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial **Bapak Bustami** pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 11.15 WIB

“ iya ada, pembinaan individu yang kita lakukan kepada anak jalanan, jenis pembinaan seperti agama, jika mereka dari warga Pekanbaru kami beri pembinaan seperti keterampilan, bengkel, menjahit, tapi pembinaan itu hanya untuk anak jalanan yang khusus warga Pekanbaru saja. Kalau yang dari luar Pekanbaru tidak dilakukan karena akan kami pulangkan ke orangtuanya. Kami bekerja sama dengan BERSENPEKA yang di Rumbai. BERSENPEKA itu Balai Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dan dibawah naungan Kementrian, adapun untuk anak jalanan yang berasal dari Kota Pekanbaru kami memberikan pembinaan, seperti kegiatan bengkel las, bengkel otomotif dan lain sebagainya. Dan pembinaan itu dilakukan selama 3 bulan hingga 6 bulan. Untuk Shelter penampungan hanya bisa menampung 3-7 hari saja, karena untuk shelter ini hanya khusus bagi anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru. Setelah ditampung, kami menunggu orangtua mereka untuk menjemput anaknya. Apabila tidak ada dijemput, maka akan kami serahkan ke panti asuhan”.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap Bapak Bustami dan Ibu Fajrina dapat menyimpulkan bahwasannya Dinas Sosial sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah bekerjasama untuk mengurangi anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru, hanya saja sarana dan prasarananya yang tidak memadai sehingga pembinaannya kurang maksimal.

C. Rekapitulasi Variabel Responden Tentang Hasil Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dari hasil Analisis Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang diukur berdasarkan indikator-indikator diatas, maka dapat direkap tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5: Rekapitulasi Tanggapan responden tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Pembinaan Individu	57	34	9	100
2	Pembinaan Kelompok	48	38	10	96
Jumlah		105	72	19	196

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel V.5a diatas rekapitulasi tanggapan responden tentang Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial dapat dijelaskan bahwa untuk seluruh indikator dimana menjawab Terlaksana dengan skor 105, sementara itu menjawab Cukup Terlaksana dengan skor 72 dan menjawab Kurang Terlaksana dengan skor 19 dengan jumlah skor keseluruhan 196.

Jadi dapat diketahui Rekapitulasi tanggapan responden dalam Pembinaan Anak Jalanan Dinas Sosial jika dilihat dari dua indikator penelitian tentang Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota pekanbaru dengan 2 indikator yang

digunakan, yaitu Pembinaan Individu, Pembinaan Kelompok, jawaban Responden dapat di kategorikan “**Cukup Terlaksana**” dengan Skor 196 dengan skala Interval 151-210, yang artinya dua indikator tidak semua item penilaian terlaksana dengan baik.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menggunakan 2 indikator menurut Asmaya (2013:11) yaitu : Pembinaan Individu, Pembinaan Kelompok, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait terutama bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan terkhususnya Bidang Rehabilitasi Sosial.

A. KESIMPULAN

1. Pembinaan Individu adalah yang dilakukan dan dibina langsung dilapangan, tujuan dari pembinaan ini untuk mendampingi, mengenal dan berdiskusi dengan anak jalanan, dengan kegiatan, antara lain: konseling, diskusi dan *sharing* pengalaman. Pada hasil Kuisisioner yang diperoleh peneliti terhadap indikator Pembinaan Individu anak jalanan dengan jumlah Skor 100 dan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis dalam pembinaan individu dalam melakukan pembinaan terkait pembinaan anak jalanan masuk didalam kategori “Cukup Terlaksana”.

2. Pembinaan Kelompok, yakni pembinaan dengan cara mengumpulkan para anak jalanan dan melakukan pendampingan serta mengkaji permasalahan bersama dalam konsep perubahan sikap dan perilaku. Selain itu juga dapat dilihat apakah dalam melakukan pembinaan pihak yang turun kelapangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak jalanan yang dibina sudah sesuai dengan standar apa belum. Pada hasil Kuisisioner yang diperoleh peneliti terhadap indikator Pembinaan Kelompok sesuai dengan standar pada pembinaan anak jalanan dengan jumlah skor 96, berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dalam pembinaan kelompok sesuai dengan standar bahwasannya Bidang Rehabilitasi sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan sudah berdasarkan standar hal ini didapatkan penulis dari penjelasan seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak, yang berada dalam penilaian “Cukup Terlaksana”.

B. Faktor Penghambat Analisis Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Masih minimnya fasilitas pendukung pembinaan anak jalanan rumah singgah atau disebut Shelter, karena pada saat sekarang ini Shelter hanya bisa menampung 10 orang dalam 1 rumah untuk pembinaan anak jalanan. Pemerintah Provinsi Riau tidak mengizinkan terhadap Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mempunyai fasilitas Panti yang cukup besar untuk menampung 300 PMKS.

2. Faktor Lingkungan, dimana masih kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga sosial maupun pihak-pihak swasta dalam mengatasi masalah anak jalanan, begitu juga dengan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk mengatasi anak jalanan ini membuat usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini menjadi lebih sulit.
3. Faktor sumber daya manusia, kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial sangat terbatas sehingga kemampuan untuk melakukan pembinaan baik mental maupun keterampilan sangat sulit dilakukan.
4. Faktor ketegasan penegakan sanksi, bahwa penegakan sanksi belum dilakukan sesuai dengan ketentuan pidana Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat (1&2) bahwasannya :
 - (1) barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah),
 - (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini adalah pelanggaran.

Tetapi dilapangan sanksi tersebut tidak ditegakkan atau dilaksanakan, sehingga anak jalanan tidak jera dan mereka akan kembali meminta-minta ataupun berkeliaran dijalanan.

C. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Sosial agar memberikan bimbingan keagamaan kepada orang tua anak jalanan agar bisa menyadari tanggung jawab mereka terhadap anak yang telah dititipkan Allah SWT.
2. Untuk Dinas Sosial harus lebih meningkatkan SDM yang berkualitas, karena dengan adanya SDM yang berkualitas dan unggul akan memberikan kemudahan bagi organisasi pelaksana untuk bisa mewujudkan kebijakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ingin dicapai.
3. Untuk Dinas Sosial jika sanksi yang diberikan kepada anak jalanan dan masyarakat tidak berjalan dengan baik, sebaiknya sanksi tersebut lebih dipertegas supaya anak jalanan sedikit berkurang dan tidak ada lagi masyarakat yang memberi.
4. Untuk Dinas Sosial membuat semacam kampanye kepada masyarakat luas untuk peduli dan meningkatkan kesadaran terhadap anak-anak jalanan yang ada di Indonesia ini khususnya di Kota Pekanbaru melalui poster, iklan, layanan dan sebagainya.
5. Untuk kepada kepala serta pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar kegiatan/program pembinaan anak jalanan lebih diingatkan dan dikembangkan agar anak jalanan memiliki bekal untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graham Ilmu: Yogyakarta..
- Agustin, Dian. 2002. *Profil Anak jalanan di kota Malang (studi kasus anak jalanan di alun-alun dan perempatan Rampal Kota Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang
- Asmaya, 2013. *Bentuk – Bentuk Pembinaan*, Penerbit Alfbet, Bandung.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Departemen Sosial RI. 2005. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Depsos RI. 2003. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial 2 Biro Kepegawaian dan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dekdikbud, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Gibson, Ivancevich, Donelly. (2005). *Produktivitas Kerja. Edisi ke8*. Jakarta: Birarupa Aksara.
- Hasibuan, H Melayu, S.P. 2014 *Manajemen Dasar. Pengertian dan Masalah edisi Ketujuh*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, melayu SP. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Indrawijaya, Adam I. 2009. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset.
- Ivancevich, John M, dkk. (2008). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

Jakarta: Salemba Empat

Mangunhardjana, A. M. (2001). *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.

Manullang, 2004. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE

Noor. J. (2012). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Indonesia: PrenadaMedia Group.

Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Robbins, Stephen P.(2003). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Indonesia: Prenadamedia Group.

Sudarsono. 2009. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rineka Cipta Kerja

Suyanto, Bagong. 2003. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: PT Bumi Aksara.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Terry, George R. 2006. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Terry, George R. 2014 *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Tangkilisan, Noggiettessel. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo:

Jakarta.

Wedayanti, Made Devi. 2018. *Manajemen CSR (Corporate Social Responsibility)*. Pekanbaru.

Winardi, 2009. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Press.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli, dan Moris Adidi Yogia. 2014. *Fungsi – Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: MarpoyanTujuh.

Zulkifli, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru